

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Situasi di RD Kongo telah diwarnai konflik sejak awal kemerdekaanya. Konflik ini terus menerus berlangsung dan menjadi perang terbuka. Terjadi dua kali berperangan yang mengakibatkan situasi di RD Kongo menjadi kacau. Perang Komgo I terjadi pada tahun 1996-1997 kemudian pada tahun 1998-2003 terjadi Perang Kongo II. NPenyebab yang paling utama adalah dikarenakan adanya konflik antar etnis Tutsi dan Hutu yang dimanfaatkan oleh kelompok pemberontakan untuk menggulingkan pemerintahan. Etnis Tutsi dan Hutu berusaha untuk menguasai pemerintahan. Pada 10 Juli 1999, ditandatangani Perjanjian Lusaka yang salah satunya adalah menyetujui penempatan pasukan perdamaian MONUC PBB di RD Kongo. Kemudian tahun 2003, konflik diakhiri dengan ditandatanganinya Perjanjian Pretoria dengan Rwanda dan Perjanjian Luanda dengan Uganda. Isi perjanjian tersebut adalah pihak asing setuju untuk menarik mundur pasukannya dari RD Kongo.

Meskipun telah ada perjanjian perdamaian, konflik masih terus saja berlangsung terutama di wilayah timur RD Kongo. Oleh karena itu, DK PBB mengeluarkan resolusi-resolusi yang menambah dan memperkuat mandat MONUC di RD Kongo agar dapat menangani perkembangan konflik. Mandat MONUC berkembang dari *peacekeeping* menjadi *peacebuilding* dengan tujuan untuk mencegah konflik yang masih terjadi mejadi perang terbuka kembali. Sejak tahun 2004, MONUC telah mendapatkan mandat untuk terlibat dalam proses perlindungan warga sipil. Pada tahun 2010, MONUC diubah menjadi MONUSCO

sebagai tanda bahwa mandat pasukan perdamaian ini berfokus pada proses stabilisasi dan kondolidasi perdamaian.

Dalam melaksanakan proses *peacebuilding*, MONUSCO melakukan aktivitas-aktivitas yang akan membantu dalam meningkatkan perdamaian berkelanjutan dan mencegah perang terjadi kembali. Ada enam hal yang dilakukan MONUSCO yaitu pembaharuan pemerintahan, DDR, reformasi sektor keamanan, pemilihan umum pascaperang, membantu dalam penegakan HAM, dan menguatkan peranan masyarakat sipil. Untuk pembaharuan pemerintahan, MONUSCO membantu pemerintah dalam melaksanakan fungsi demokratisasi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif. MONUC membuat *International Security and Stabilization Support Strategy* (ISSSS) untuk membantu program pemerintah RD Kongo yaitu *Government's Stabilization and Reconstruction Plan for War-Affected Areas* (STAREC). Dalam DDR, MONUSCO melucuti para kombatan dan bekerjasama dengan badan PBB dan organisasi internasional lainnya dalam membantu proses integrasi mantan kombatan.

Dalam sektor keamanan MONUSCO melakukan reformasi kepolisian, militer dan pengadilan. Reformasi kepolisian dan militer diperkuat dengan dilakukannya pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kapasitas personel kepolisian dan militer. Sementara itu dalam reformasi pengadilan, MONUSCO melatih hakim, jaksa dan pengacara serta melakukan kerjasama dalam memperkuat sistem pengadilan. Dalam pemilihan umum pascaperang, MONUC membantu pendistribusian logistik pemilu dan melakukan pengawasan serta edukasi untuk para pemilih. Untuk penegakan HAM, MONUSO menangkap dan mengadili serta mengawasi peradilan bagi pelaku-pelaku kejahatan kemanusiaan. MONUSCO

juga melakukan perbaikan insitinsi yang berhubungan dalam perlindungan HAM. Kemudian, untuk meningkatkan peranan masyarakat sipil, MONUSCO melakukan dialog-dialog dengan organisasi kemasyarakatan.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti menyarankan sebaiknya MONUSCO lebih meningkatkan lagi proses yang ada dalam peacebuilding. Peningkatan kapasitas nasional perlu dilakukan agar negara dapat menyelesaikan konflik yang terjadi. Kemudian MONUSCO dapat melakukan proses DDR hingga ke tahapan integrasi yang benar-benar berhasil dan mencegah mantan kombatan bergabung kembali ke dalam kelompok bersenjata. MONUSCO juga harus memperkuat kepolisian dan militer sehingga kelompok bersenjata yang terus melakukan kekerasan dapat diatasi. Kemudian MONUSCO juga lebih harus memperkuat sistem peradilan agar para semua pelaku kejahatan kemanusiaan dapat diadili sepenuhnya. Kemudian peranan masyarakat sipil perlu ditingkatkan kembali dan adanya rekonsiliasi antar sesama komunitas masyarakat sipil.

